

## ABSTRAK

**Dzikri Abazis Subekti:** Impelemenntasi Afirmasi Perekrutan Aparatur Sipil Negara Untuk Penyandang Disabilitas dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018

Penyandang disabilitas masih kesulitan mencari dan memperoleh bekerja karena dianggap kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Namun, setiap manusia memiliki hak-hak termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 44 Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan afirmasi, mengetahui kendala dan menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan, teori tentang Ketenagakerjaan dan teori Penyandang Disabilitas. teori Implementasi Kebijakan akan digunakan untuk menganalisis proses implementasi Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018. Sementara teori tentang Ketenagakerjaan dan teori Penyandang Disabilitas akan digunakan untuk mengetahui pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas dan mengevaluasi dampak kebijakan afirmatif terhadap hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode Normatif-empiris, yaitu data diperoleh dari perundang-undangan, peraturan daerah dan data yang di dapat dari lapangan berdasarkan kejadian dan wawancara, disusun secara sistematis setelah diselesaikan berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan afirmasi dalam perekrutan Aparatur Sipil Negara untuk penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan melalui serangkaian langkah konkret yang dirancang untuk memastikan inklusi dan kesetaraan akses dalam dunia kerja, faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi perekrutan Aparatur Sipil Negara untuk penyandang disabilitas belum memiliki standar oprasional untuk pelaksanaannya bahkan belum memiliki Unit Layanan Disabilitas sebagai bentuk penyedia informasi kerja. Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah mengambil langkah proaktif dalam memfasilitasi peluang untuk penyandang disabilitas dengan menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tetapi belum memiliki standar operasional untuk pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Purwakarta pun belum memiliki sebagai bentuk penyediaan informasi lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

**Kata Kunci :** Implementasi, Afirmasi, Hak Pekerja, Penyandang Disabilitas

## ABSTRACT

**Dzikri Abazis Subekti:** Impelemenntasi Affirmation Recruitment of State Civil Apparatus for Persons with Disabilities is connected with the Purwakarta District Regulations Number 8 Year 2018.

Persons with disabilities still have difficulty finding and obtaining employment because they are considered to be less productive and unable to work. However, every human being has rights, including the right to work. According to the Purwakarta District Regulations No. 8 of 2018, Article 44 of the Regional Government and the Regional Enterprise Authority is obliged to employ at least 2% (two percent) of the number of staff or employees with disabilities.

This study aims to find out how to enforce affirmations, know the obstacles and analyze the efforts of the government of Purwakarta district in the recruitment of State Civil Apparatus for persons with disabilities according to the Regional Regulations of Purvakarta District No. 8 Year 2018.

The theory used in this study is the policy implementation theory, the employment theory and the theory of the disability provider. The Policy Implementation Theory will be used to analyze the implementation process of Perda Purwakarta District No. 8 Year 2018. While the theories of employment and the incidence of disability theory are used to identify employers eligible for disability declarations and to evaluate the impact of affirmative policies on the rights of disabled persons.

This research uses the Normative-empirical method, i.e. data obtained from laws, regional regulations and data obtaining from the field based on events and interviews, systematically organized after completion based on the problem and seen in conformity with the applicable provisions, subsequently concluded so as to obtain the answer to the problem.

The results of the research indicate that the implementation of the affirmation in the recruitment of State Civil Equipment for persons with disabilities by the Government of the Purwakarta district is carried out through a series of concrete steps designed to ensure the inclusion and equality of access in the world of work, the impediment factor in implementing the policy of affirmations of recruiting State Civil Appliances for people with disability has not yet had optional standards for its use nor has disability Service Unit as a form of job information provider. The government of Purwakarta district has not yet as a form of provision of employment information for people with disabilities.

**Keywords:** Implementation, Affirmation, Workers' Rights, Persons with Disabilities